

## UDARASA

## Capres, Siapa Tersensual?

OLEH GARIN NUGROHO

Lebih sensual mana: Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta? Pertanyaan ini terasa menjadi olok-olok di tengah berangam perspektif analisis politik. Namun, politik di tengah abad industri hiburan tidaklah pernah lepas dari budaya penggemar alias *fans*, layaknya *fans* para penyanyi hingga bintang film. Bisa diduga, merebaknya memilih capres dan cawapres dalam perilaku budaya penggemar.

Salah satu ciri budaya penggemar adalah melahirkan citra sensualitas alias tubuh yang mampu merepresentasikan harapan sosial, ekonomi, keamanan, hingga politik tertentu masyarakat. Oleh karena itu, layaknya sosok keibing yang setiap periode berubah, demikian juga idaman sosok capres. Sebutlah era 70-an, sosok laki-laki diidamkan gendrong, kurus, bahkan sering dicandakan semakin terasa tak terawat semakin sensual, namun hal itu tentulah berbeda dengan periode sekarang ini.

Dalam perspektif sosok presiden negeri ini, pada era 1945 melahirkan sosok Soekarno yang ganteng dan flamboyan, berbaju trendi dan komunikator memesonanya, penceritaan ajakan revolusi. Kemudian muncullah sosok Soeharto, yang ganteng, tubuh diam namun mengandung ketegasan tak berampun, mencitrakan tubuh pemangku kestabilan.

Periode selanjutnya kita memiliki Habibie, tubuh tidak bisa diam namun penuh intelektual, berbeda kemudian dengan tubuh ibu ideologi dan tubuh politik instingtif Megawati. Bahkan kemudian negeri ini memiliki tubuh Gus Dur, tubuh pesantren yang rileks tapi cerdas, layaknya pendekar mabuk, penuh olok tapi berani dalam terobosan. Yang terakhir, SBY adalah tubuh tinggi besar ganteng, mencoba seimbang, teratur, tertata, santun. Bisa diduga, awalnya di periode pasca Reformasi yang penuh *chaos*, tubuh ini diharapkan memberi dunia penggemar akan kestabilan sekaligus ketegasan penuh terobosan. Harap maflum, pasca reformasi, sosok tubuh SBY menjadi populer dan melahirkan dunia penggemar yang luas.

Bagaimana dengan citra ketubuhan kandidat presiden dan wakil presiden 2014 ini?



Tubuh pasangan Jokowi-JK sangat terasa kontras dengan citra tubuh SBY-Boediono, kekонтaran ini menjadi nilai lebih tersendiri, mengingat aspek inilah yang menjadi ciri dari pemilih melodramatik Indonesia yang serba cepat kecewa dan bosan. Coba simak tubuh Jokowi yang jauh dari militer, namun tubuh rileks merakyatnya mampu melakukan terobosan pemecahan masalah, meski secara cerdas sering pemecahan masalah pada wilayah percontohan yang mampu dikendalikan, memberi dorongan partisipasi pemecahan lebih luas. Simak juga tubuh JK yang serba cepat tanggap pastilah kontras dengan tubuh Boediono yang baik dan manajerial tapi tak terberdayakan sehingga terasa tak berfungsi bebas.

Di sisi lain, tubuh dalam perspektif kultural, pasangan Jokowi-JK merepresentasikan kultur sejarah raja Jawa yang selalu mempunyai pasukan khusus untuk terobosan dan pemecahan masalah yang berasal dari Makassar, maka di Yogyakarta terdapat Kampung Bugisan sebagai bagian sejarah kolaborasi Jawa dengan Makassar.

Pada sisi lain, pasangan Prabowo-Hatta terasa tidak terlalu kontras dengan SBY-Boediono, malah banyak kesamaan. Prabowo membawa aspek militer seperti SBY, walaupun berbeda, yakni pada aspek ketegasannya, namun rasanya memberi isu ketegasan berlebihan yang memberi rasa khawatir. Sementara Hatta, hampir layaknya Boediono, lebih teknokrat ekonomi, sehingga jangkauan bicara tidaklah merakyat ataupun mengayomi sebagai negarawan. Yang menarik, kolaborasi keduanya memberi presentasi kultur militer sipil yang menjadi ciri sebagian sejarah kepresidenan bangsa ini.



Yang harus dikritisi, pemilu di budaya penggemar melahirkan fanatisme yang melunturkan sifat kritis, dewasa dan terbuka, lebih sebagai cinta berlebihan, baik pada penggemar Prabowo maupun Jokowi. Simak jika timbul kritik pada kandidat, serentak di media sosial, kubu kedua pihak, atas nama klarifikasi hingga rasionalisasi melontarkan pembelaan, meski sang bintang seperti Jokowi dengan strategi merendah ala Jawa bicara *ora opo-opo*.

## SURAT KEPADA REDAKSI



Anda dipersilakan mengirimkan surat pembaca atau komentar mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel di halaman opini, ataupun pemberitaan di Kompas. Surat pembaca atau komentar dikirim ke [opini@kompas.co.id](mailto:opini@kompas.co.id) atau ke Redaksi Kompas Jalan Palmerah Selatan Nomor 26-28, Jakarta 10270, dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau scan identitas diri.

## Harga yang Jauh Berbeda

Tertarik akan tawaran K Vision oleh *salesman* bernama Rizal, saya memutuskan berlangganan dengan alat berkualitas HD berbiaya Rp 2,8 juta. Rabu (4/6) siang, di rumah dipasang dekoder oleh petugas bernama Agus.

Karena sudah lebih dari tujuh jam perangkat tidak menyala, saya menelepon bagian pelayanan pelanggan di 500828. Penerima telepon saya bernama Abdi. Dia menjelaskan berlangganan K Vision dengan alat berkualitas HD cukup Rp 2.150.000. Saya kaget karena dirugikan Rp 650.000.

Kemudian saya mengonfirmasi informasi dari Abdi ini kepada Rizal. Jawaban Rizal macam-macam: untuk biaya garansilah, untuk biaya servislah, dan sebagainya.

Saya mohon kepada K Vision menindaklanjuti keluhan saya mengenai perbedaan harga itu karena yang dilakukan Rizal bisa masuk kategori penipuan. Ia memanfaatkan kerugian konsumen!

HARRY SAPUTRA L  
Bumi Permata Indah Blok A3/29, Karang Mulya,  
Karang Tengah, Tangerang

## KOMPAS

TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965

Pemimpin Umum:	Jacob Oetama
Wakil Pemimpin Umum:	Agung Adiprasetyo, St. Sularto
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:	Rikard Bagas
Wakil Pemimpin Redaksi:	Trias Kuncayohono, Budiman Tanurejdi, Ninuk Mardiana Pambury
Redaktur Pelaksana:	James Luhulima
Wakil Redaktur Pelaksana:	Mohammad Bakir, Bambang Sigap Sumantri, Rusdi Amral
Selektaris Redaksi:	Retno Bintarti, M. Nasir

## PROF OLLE TORNQUIST

## DEMOKRASI INDONESIA HARUS KOKOH

Proses demokrasi di Indonesia harus bertahan kokoh karena kerumitan dalam proses demokrasi prosedural berpeluang mengembalikan Indonesia ke jurang otoritarianisme. Dinamika demokrasi dipantau dari kapasitas politik aktor demokrasi dalam memanfaatkan atau menyalahgunakan prosedur.

OLEH MARIA HARTININGSIH &amp; BUDI SUWARNA

Regulasi pemilu cukup baik dan pelaksanaannya berjalan bebas meskipun pemilu tahun ini tampaknya ada peningkatan kasus intimidasi dan kecurangan," ujar pakar ilmu politik dari Universitas Oslo, Prof Olle Tornquist, tahun ini (63). "Tetapi partai hampir tidak diatur sama sekali. Mereka bahkan tidak harus bersikap demokratis. Para pemimpin dan para kadernya nyaris bisa bertindak apa pun."

Olle ditemui di Jakarta, ketika kembali dari Aceh, akhir Januari 2014. Wawancara dilanjutkan setelah pemilu legislatif melalui surat elektronik.

Menjelang akhir tahun 2013 sampai awal tahun 2014, Olle melakukan survei lanjutan tentang aktor demokrasi, fokus penelitian yang membedakan Olle dengan peneliti demokrasi lain, yang lebih tertarik pada prosedur dan kelembagaan. Ia menghadiri lokakarya hasil survei putaran akhir di Yogyakarta, sebulan lalu.

Melalui hasil survei lebih dari 500 responden dari Aceh sampai Maluku, ia melihat dinamika demokrasi melalui variabel kapasitas politik para aktor. Survei putaran ketiga tahun 2013 bersama tim peneliti Universitas Oslo dan Universitas Gadjah Mada di bawah proyek penelitian "Power, Welfare and Democracy" adalah kelanjutan survei bersama Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos), pertama tahun 2003, kedua tahun 2007.

Menurut Olle, demokrasi seharusnya berujung pada peningkatan kesejahteraan, tetapi demokrasi elektoral yang menjamin hak sipil dan politik tidak cukup mendorong demokrasi tersambung pada kesejahteraan.

Olle mengikuti dari dekat beberapa peristiwa politik penting di negeri ini. Ia sedang melakukan studi di Yogyakarta ketika terjadi penyerbuan markas Partai Demokrasi Indonesia pimpinan Megawati, Juli 1996. Ia tiba di Jakarta tak lama setelah pembredelan *Tempo*, *Detik*, dan *Editor*, Juni 1994. Ia sedang melakukan studi di Filipina saat Soeharto turun, setelah pengepungan Gedung DPR MPR, Mei 1997.

## Dibajak

Basis argumen yang diungkapkan Olle sejak survei tahun 2003, yang disimpulkan tahun 2004, adalah dibajaknya demokrasi prosedural oleh para elite lama dan baru yang terutama memiliki akses pada modal ekonomi (uang), kekuasaan, dan koneksi.

"Pelaku oligarki di Indonesia adalah orang-orang dengan modal ekonomi (uang), tetapi untuk bisa mendominasi politik dan memenangkan pemilu, mereka perlu mengubah uang itu menjadi se-bentuk legitimasi dan otoritas. Untuk itu, mereka membutuhkan banyak modal sosial (koneksi), pengetahuan juga kientilisme dan populisme."

Oleh sebab itu, "Tak diragukan lagi, partai-partai di parlemen disetir dan didominasi oleh kekuatan oligarki dan pemimpin dengan banyak modal simbolik dan koneksi khusus."

Hasil survei 2013 itu membenarkan karakter kientilistik demokrasi di Indonesia. Meskipun kepemilikan modal dan koneksi (politik) tidak serta-merta mengimplikasikan politik kientilisme, kombinasi keduanya dipahami secara luas sebagai elemen utama hubungan patron-klien.

## BAHASA

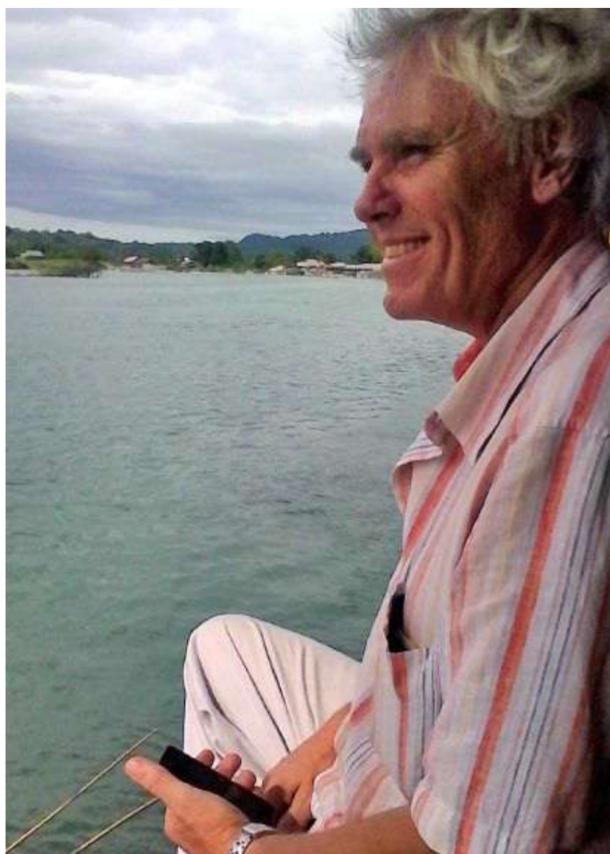
## Indonesianis "Palsu"

Berbeda dengan para Indonesianis, seperti Bill Liddle dan Daniel Lev (alm), Prof Olle Tornquist mengaku tidak berbahasa Indonesia dengan baik. "Saya Indonesianis palsu," katanya, "Maafkan saya!"

Bidang kajiannya memang bukan Indonesia, melainkan perbandingan politik dan isu pembangunan. Perhatian utama awalnya adalah persoalan umum dari isu anti imperialisme dan gerakan sosial di wilayah Selatan Global.

Olle sempat ikut kursus bahasa Indonesia ketika melakukan penelitian untuk tesis MA, awal tahun 1970-an. Ia melakukan kajian lebih lanjut tentang masalah dan pilihan-pilihan demokratisasi di Indonesia dan perbandingan dengan gerakan serupa di India dan Filipina, sejak akhir tahun 1980-an.

Ia mengasah kemampuannya berbahasa Indonesia dengan melakukan dan memandu riset intensif tentang gerakan



NUSYA KUSWANTIN

Olle Tornquist di Tentena, Palu, Sulawesi Tengah, Desember 2013.



ARSIP PRIBADI

Olle Tornquist dalam perjalanan menuju Ambon.

"Saya kira makin banyak orang sadar bahwa politik yang didominasi kaum elite itu menghancurkan," ujar Olle, "Harus ada pembaruan dalam sistem pemilu dan kepartaian, juga kebijakan untuk membangun saluran-saluran tambahan bagi keterwakilan kepentingan, gagasan, dan kaum minoritas."

## Gerakan demokrasi

Menurut Olle, persoalan dasar saat ini bukan sistem pemilu atau sistem kepartaian, melainkan tidak adanya organisasi-organisasi berbasis kepentingan dan gagasan yang dibangun dari bawah, tersebar di sejumlah daerah dan terintegrasi di tingkat nasional. Ia mengingatkan dominasi kelompok bisnis harus diimbangi dengan gerakan berorientasi kerakyatan. "Tanpa itu, kelompok pro demokrasi tidak bisa membangun partai yang lebih baik dan memenangkan pemilu, meskipun ada berbagai aturan dan regulasi," ujarnya.

Gerakan dan organisasi berbasis massa yang demokratis dapat menyumbang gagasan-gagasan dalam implementasi kebijakan dan mengawasi politisi serta birokrat agar akuntabel. "Pemenang pe-

milu tak bisa seenaknya," tegas Olle, "Tanpa organisasi seperti ini, parpol akan tetap dikuasai kelompok elit yang sangat berkuasa. Berbagai kepentingan dan gagasan akan sangat diwarnai pikiran para pemimpin informal, NGO yang elit, kelompok lobi dan aksi yang juga elit dan tidak terlalu demokratis."

Dengan kata lain, "Kita tidak bisa memiliki sistem kepartaian dan sistem pemilu yang lebih baik hanya dengan mengandalkan para ahli untuk merancang hukum dan aturan, atau meminta para pimpinan parpol dan anggota parlemen untuk mereformasi diri sendiri. Juga tidak bisa meliberalisasi sistem politik yang mengarah pada politik berbasis figur, karena cara seperti itu sangat naif, sama naifnya dengan menganggap satu figur bisa menyelesaikan persoalan ekonomi dan oligarki seperti layaknya pasar bebas."

Olle melanjutkan, "Pasar tidak netral. Kita berhadapan dengan ekonomi politik. Persoalan terpenting adalah kekuasaan. Untuk keseimbangan, warga biasa dan kelompok-kelompok kepentingan yang utama harus berorganisasi dengan lebih baik agar mereka bisa

mengklaim keterwakilannya."

## Reformasi bertahap

Meski demikian, menurut Olle, untuk mengurangi beberapa persoalan dan mendorong organisasi-organisasi berbasis kepentingan dan gagasan yang lebih solid, harus ada reformasi sistem kepartaian dan sistem pemilu secara bertahap.

Dengan memperhatikan semua kepentingan penuh pamrih dari para bos kelompok politik dan bisnis yang sangat berkuasa, Olle mengusulkan komisi pemerintah yang independen dengan para pakar yang memiliki reputasi dan integritas tinggi, terkait keterwakilan demokrasi dan beberapa pemimpin terbaik dari parpol. Di dalam komisi itu digodok berbagai gagasan, lalu didiskusikan secara luas dengan publik. Proposal final yang sudah disepakati secara luas tidak boleh ditolak mentah-mentah oleh presiden ataupun parlemen.

Gagasan yang tampaknya dipergaruhi sistem politik di Skandinavia bisa saja diperdebatkan. Namun, beberapa hal penting yang diungkapkan Olle tampaknya harus dipertimbangkan.

Di antaranya dibukanya ruang partisipasi bagi warga negara yang memungkinkan aksi warga untuk membangun partai anti korupsi di tingkat lokal, seperti Aam Aadmi Party (Partai Rakyat Jelata, AAP), diresmikan 26 November 2012, yang kemudian memenangkan pemilu kota New Delhi.

"Saat ini memang hal itu hampir tidak mungkin terjadi di Indonesia saat ini," ujar Olle, "Dan benar-benar sulit untuk membangun Partai Buruh seperti yang dibuat Lula di Brasil, yang mampu memprakarsai dan mendorong dana partisipasi dan kebijakan kesejahteraan yang berlaku saat ini dan mengombinasikannya dengan pertumbuhan ekonomi."

Istilah "partisipasi pemangku kepentingan" dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) tampaknya sangat menganggu Olle karena pada kenyataannya tidak demokratis dan tak mengubah apa pun.

"Partisipasi harus berdasarkan keterwakilan demokratik dari bawah, bukan dipilih atau ditanam dari atas," ujar Olle, "Untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan dinamik, seperti halnya melawan korupsi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kelompok-kelompok dan kepentingan yang selama ini dipinggirkan. Beri mereka perlakuan khusus."

## PROF OLLE TORNQUIST

◆ Lahir: Uddevalla, Swedia, 2 Juni 1951

◆ Pekerjaan: Profesor Ilmu Politik dan Riset Pembangunan, Departemen Ilmu Politik, Universitas Oslo

◆ Pendidikan: PhD di bidang Ilmu Politik Universitas Uppsala, Swedia (1983); Filosofie Kandidatexamen, Universitas Gothenburg, di bidang Ilmu Politik dan Sejarah Ekonomi (1975)

◆ Pengalaman profesional, di antaranya: Co-director Program PCD untuk Asia dan Asia Tenggara di bidang pendidikan dan riset mengenai PCD, Kekuasaan, Konflik, dan Demokrasi (mitra utama Universitas Oslo, Gadjah Mada, dan Colombo) sejak tahun 2006; co-direktur bidang akademik Demos (2002-2008); pendiri dan Direktur Seminar untuk Kajian Pembangunan Universitas Uppsala (1982-1997); Sekretaris Eksekutif dan Penasihat Film-Centrum, Stockholm (1974-1976)

◆ Proyek riset yang sedang berjalan, antara lain: Power, Welfare and Democracy (dengan Fisipol UGM); Democracy, Welfare and Development, Indian and Scandinavian Experiences

◆ Buku, di antaranya: Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics (2013); Assessing Dynamics of Democratization: Transformative Politics, New Institutions, and the Case of Indonesia (2013); Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratization (2005); Rethinking Popular Representation: Governance, Security and Development (2009); Politics and Development: a Critical Introduction (1999); Indonesia Post-Soeharto Democracy Movement (2003)

dan menulis. Karya bukunya belasan serta puluhan artikel dan antologi.

Sepintas ia terlihat sangat serius. Namun, sikap itu cair jika ia bersantai makan siang atau makan malam bersama Birgitta. Menurut Nusya, kalau Birgitta tidak ikut ke lapangan, Olle bekerja spartan, dari pagi hingga jauh malam.

Olle kecil lebih banyak tinggal bersama kakek-neneknya di daerah pertanian di pesisir barat Swedia setelah orangtuanya bercerai. Ayah dua anak itu kini membagi waktunya antara Oslo di Norwegia dan Kungshamn di Swedia, yang jaraknya lebih dari 200 kilometer. Itu sebabnya, ia suka memperkenalkan dirinya sebagai buruh migran. "Tinggal di Swedia, mengajar di Norwegia," katanya.

Di Kungshamn ia menghabiskan sedikit waktu senggangnya dengan Birgitta dan kapal layar tuanya yang "diparkir" di depan rumah. (MH/BSW)